

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persampahan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian utama di Kota Padang. Sampah dihasilkan dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Kota Padang. Sampah dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari berbagai aktivitas yang dilakukan. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mendefinisikan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.

Masalah yang ditimbulkan oleh sampah dapat terjadi di berbagai sektor, salah satu sektor yang berpotensi untuk menghasilkan sampah dengan kuantitas tinggi adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling potensial untuk dikembangkan dalam memperkenalkan alam, budaya, dan kearifan lokal suatu wilayah. Sektor pariwisata akan mendatangkan wisatawan, baik lokal maupun internasional untuk beramai-ramai menikmati suatu daerah dengan tujuan beragam, seperti liburan atau studi. Sektor wisata merupakan salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Kedatangan wisatawan pada suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW) telah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat (Wahab, 2003).

Sebagai ibukota dari Sumatera Barat, potensi Kota Padang dalam mengembangkan sektor wisata sangatlah besar. Sektor wisata yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Padang adalah wisata pantai. Salah satu pantai yang masuk dalam target pengembangan adalah Pantai Padang. Pantai Padang merupakan pantai yang berada di pusat Kota Padang yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Lokasi Pantai Padang yang mudah dicapai menjadi alasan pantai ini ramai dikunjungi wisatawan.

Pantai Padang dalam pelaksanaannya masih belum terbebas dari masalah persampahan. Menurut Keputusan Walikota Padang No. 550 Tahun 2014 tentang Kawasan Bebas Sampah, Kawasan Wisata Pantai Padang masuk dalam kawasan bebas sampah, namun pengelolaan persampahan yang ada belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari banyak hal, salah satunya tentang pemilahan dan pewadahan. Masih banyak pengunjung yang membuang sampah tanpa memilah terlebih dahulu di luar tempat sampah. Kemudian, masih banyaknya pedagang yang mengumpulkan sampah di pembatas jalan setelah berjualan.

Selain dari peraturan di atas, Kawasan Wisata Pantai Padang juga masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPAR) Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 – Tahun 2025. RIPPAR Provinsi tersebut menjelaskan bahwa pembangunan Destinasi Tujuan Wisata (DTW) dapat dilakukan dengan beberapa upaya, salah satunya pembangunan daya tarik wisata dan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, serta fasilitas pariwisata. Apabila masalah persampahan belum teratasi dengan benar, maka pembangunan tersebut juga akan terganggu.

Berdasarkan kondisi eksisting dan peraturan yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kawasan Wisata Pantai Padang yang ada sudah tidak relevan. Diperlukan adanya perencanaan umum dan strategi pengelolaan sampah Kawasan Wisata Pantai Padang guna membangun Kawasan Wisata Pantai Padang sesuai dengan rencana pembangunan di atas. Perencanaan sistem pengelolaan sampah di Kawasan Wisata Pantai Padang tersebut kemudian dapat dijadikan referensi tambahan bagi RIPPAR Kota Padang. Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Pantai Padang dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga atau peraturan yang terkait dengan pengelolaan sampah lainnya. Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Kawasan Wisata Pantai Padang ini memuat aspek teknis operasional berupa pemilahan dan pewadahan, pengumpulan, pengolahan, pemindahan, dan

pengangkutan serta aspek nonteknis berupa peraturan, kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat

1.2 Maksud dan Tujuan Perencanaan

1.2.1 Maksud Perencanaan

Maksud perencanaan dari tugas akhir ini adalah untuk merencanakan pengelolaan sampah di Kawasan Wisata Pantai Padang yang meliputi aspek teknis operasional dan aspek nonteknis yang berbasis 3R.

1.2.2 Tujuan Perencanaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan pengelolaan sampah yang telah ada di Kawasan Wisata Pantai Padang;
2. Mengukur dan menghitung timbulan, komposisi, dan potensi daur ulang sampah di Kawasan Wisata Pantai Padang;
3. Merencanakan skenario pengelolaan sampah Kawasan Wisata Pantai Padang;
4. Menghitung rencana anggaran biaya (RAB) pengelolaan sampah dalam tahap I di Kawasan Wisata Pantai Padang.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat didapat dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh data terbaru mengenai timbulan, komposisi, dan potensi daur ulang sampah di Kawasan Wisata Pantai Padang dari berbagai fasilitas berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan muara sungai. Data timbulan, komposisi, dan potensi daur ulang dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam pengelolaan sampah Kawasan Wisata Pantai Padang dan penyelenggaraan RIPPAN Kota Padang;
2. Dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan Sistem Pengelolaan Sampah Kawasan Wisata Pantai Padang guna mewujudkan Kawasan Wisata Pantai Padang sebagai Kawasan Bebas Sampah.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian tentang timbulan, komposisi, serta potensi daur ulang adalah sebagai berikut.

1. Lokasi penelitian dilakukan di sepanjang garis Pantai Padang (Jalan Batang Arau sampai dengan Jalan Samudra sepanjang 4 km) terhadap fasilitas yang sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
2. Frekuensi sampling 8 hari berturut-turut sesuai dengan SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan;
3. Penentuan timbulan sampah Pantai Padang berdasarkan SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Timbulan sampah dinyatakan dalam satuan volume berdasarkan luas ($l/m^2/h$) dan pengunjung ($l/o/h$);
4. Pengukuran komposisi sampah didasarkan pada SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan dengan kategori yang disesuaikan dengan modifikasi kategori pemilahan sampah dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013, yaitu sampah layak kompos (sisa makanan dan sampah halaman), sampah layak daur ulang (sampah kelapa atau kerang, kertas, kayu, kain, plastik, kaca, dan logam), dan sampah lain-lain (tekstil, karet, dan lain-lain). Komposisi dinyatakan dalam volume (l);
5. Penentuan potensi daur ulang sampah Kawasan Wisata Pantai Padang didasarkan pada komposisi sampah layak kompos dan sampah layak daur ulang. Potensi daur ulang sampah dinyatakan dalam persentase daur ulang dan persentase residu;
6. Evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah di Kawasan Wisata Pantai Padang Kota Padang dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2013 serta peraturan terkait pengelolaan sampah yang berlaku;
7. Perencanaan sistem pengelolalaan persampahan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang dalam kurun waktu 12 tahun (tahun 2019 – tahun 2030) yang dibagi dalam 2 (dua) tahap.

- a. Tahap I : tahun 2019 – tahun 2025
 - b. Tahap II : tahun 2026 – tahun 2030
8. Perencanaan aspek teknis operasional pengelolaan sampah meliputi:
- a. Perencanaan sistem pemilahan sesuai dengan kategori pemilahan yang ditentukan dan perencanaan sistem pewadahan sesuai dengan sistem pemilahan;
 - b. Perencanaan sistem pengumpulan yang disesuaikan dengan sistem pewadahan;
 - c. Perencanaan sistem pengolahan sampah berbasis 3R sesuai dengan komposisi sampah;
 - d. Perencanaan sistem pemindahan dan sistem pengangkutan yang disesuaikan dengan jumlah sampah dari hasil pengolahan dan sampah lain-lain.
9. Perencanaan pengembangan aspek nonteknis pengelolaan sampah meliputi peningkatan aspek peraturan, kelembagaan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat;
10. Perencanaan anggaran biaya pengelolaan sampah tahap I.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang literatur mengenai aspek teknis operasional dan aspek nonteknis pengelolaan sampah serta penelitian terdahulu mengenai pengelolaan sampah pariwisata.

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN WISATA PANTAI PADANG

Berisi tentang RTRW Kota Padang dan penetapan kawasan strategis, administrasi, kondisi perairan, kependudukan di Pantai Padang, pembagian sektor dan permasalahan di Kawasan Wisata

Pantai Padang, serta penyelenggaraan acara di Kawasan Wisata Pantai Padang.

BAB IV PROFIL KONDISI EKSISTING SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN WISATA PANTAI PADANG

Berisi tentang permasalahan persampahan yang ada di Kawasan Wisata Pantai Padang meliputi sumber sampah, pemilahan dan pewadahan, pengumpulan, pengolahan, pemindahan, dan pengangkutan.

BAB V METODOLOGI PERENCANAAN

Berisi tentang pengumpulan data, penentuan jumlah sampel, rencana teknis *sampling*, metode analisis, lokasi, dan waktu perencanaan serta tahapan perencanaan.

BAB VI EVALUASI, IDENTIFIKASI PERMASALAHAN, DAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN WISATA PANTAI PADANG

Berisi tentang evaluasi pengelolaan sampah eksisting terhadap peraturan yang berlaku, pengidentifikasian permasalahan kondisi eksisting yang meliputi aspek teknis operasional dan nonteknis, serta kebutuhan pengembangan yang akan dilakukan untuk mengelola sampah di Kawasan Wisata Pantai Padang.

BAB VII RANCANGAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN WISATA PANTAI PADANG

Berisi rencana umum pengembangan yang meliputi jangka waktu perencanaan, proyeksi timbulan sampah selama waktu perencanaan pengolahan sampah, aspek teknis operasional, dan aspek nonteknis.

BAB VIII RENCANA TINDAK LANJUT SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN WISATA PANTAI PADANG

Berisi tentang rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk pengelolaan sampah Kawasan Wisata Pantai Padang selama

periode perencanaan yang meliputi aspek teknis operasional dan nonteknis.

BAB IX SPESIFIKASI TEKNIS

Berisi tentang spesifikasi peralatan terpilih yang digunakan dalam rancangan Sistem Perencanaan Pembangunan (SPP) yang telah dirancang pada bab sebelumnya.

BAB X RENCANA ANGGARAN BIAYA

Berisi tentang biaya yang dibutuhkan untuk sistem pengelolaan sampah yang telah dirancang, meliputi dana masuk dan dana yang dikeluarkan pada tahap I.

BAB XI PENUTUP

Berisi tentang mengenai simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari perencanaan yang telah dibuat.

